

3.4 KEUANGAN

a. Program Pembangunan

Program dan kegiatan pembangunan bidang keuangan pada Tahun 2021 diarahkan meningkatnya kualitas pengelolaan retribusi dan pajak daerah, serta meningkatnya pengelolaan sistem administrasi keuangan daerah, Adapun program kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2021 pembangunan bidang Keuangan dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 44.346.558.109** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.40.352.565.986** atau **91%**. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program terdiri dari 8 kegiatan meliputi 30 Sub Kegiatan Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.237
Target Realisasi Anggaran
Urusan Keuangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Keuangan	44,952,243,465		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43,017,094,665		
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,517,600	50,517,600	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,296,000	24,296,000	100%
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,221,600	26,221,600	100%
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.176.869.409	11.906.120.157	
1 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	10.516.809.009	10.334.296.927	99%
2 Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1.624.744.900	1.536.507.730	95%
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.315.500	35.315.500	100%
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.000.000	85.000.000	
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	85.000.000	84.000.000	99%
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.106.918.800	1.036.526.045	
1 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.466.000	15.466.000	100%
2 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	562.030.000	509.546.515	91%
3 Penyedia Peralatan Rumah Tangga	20.932.300	20.932.300	100%

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	259.285.500	259.285.350	100%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.205.000	231.295.880	93%
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		0	0	0
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28.389.828.500	25.010.464.067	
1	Penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.389.828.500	25.010.464.067	88%
7 Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		602.275.000	552.514.392	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.020.000	222.296.392	84%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.280.000	211.553.000	98%
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.975.000	118.665.000	99%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.935.148.800	1.712.450.725	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.935.148.800	1.712.450.725	
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	37.103.000	11.715.000	32%
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	15.320.000	14.270.000	94%
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	35.005.000	23.205.000	67%
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	33.845.600	19.445.000	58%
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	79.256.000	60.796.000	77%
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	505.516.000	502.111.300	100%
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	341.445.200	336.638.425	99%
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	101.093.000	78.452.500	78%
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	0	%
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	18.241.000	17.641.000	97%
11	Penagihan Pajak Daerah	365.749.000	340.119.000	.93%
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80.552.000	57.142.000	71%
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	191.185.000	156.377.500	82%
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	130.838.000	94.538.000	73%
JUMLAH		44.346.558.109	40.352.565.986	91 %

Beberapa kegiatan dengan penyerapan anggaran yang tidak optimal antara lain :

1. Penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dapat terserap dikarenakan Tagihan untuk Penerangan lampu Jalan dari PLN Menurun.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak dapat terserap dikarenakan ada Kelebihan Anggaran Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 Tidak, yang seharusnya ikut terecofusing.
3. Perencanaan pengelolaan pajak daerah tidak dapat terserap dikarenakan ada kegiatan sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari Pandemi Covid 19.
4. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah daerah tidak dapat terserap dikarenakan ada kegiatan Makan dan Minum Rapat yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari Pandemi Covid 19.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah tidak dapat terserap dikarenakan turunnya omset pada wajib pajak yang menggunakan dan yang akan dipasang alat perekam transaksi usaha (Taping Box).
6. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah tidak dapat terserap dikarenakan tidak dapat terlaksananya SPPD Luar daerah karena Wajib Pajak yang akan didata belum siap, karena mengalami penurunan omset akibat Pandemi Covid 19.
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Penyelesaian keberatan pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

4 Kegiatan diatas Penyerapan Anggaran Tidak dapat Maksimal Karena Anggaran Makan Minum Rapat dan Anggaran Perjalanan Dinas Tidak dapat terealisasi disebabkan Pembatasan Sosial (Sosial Distancing) Untuk mengurangi Penyebaran Virus Covid 19.

Hasil Pelaksanaan Program/ Sub Kegiatan bidang keuangan, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

o **Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Berupa Merencanakan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan secara rinci dan terstruktur untuk pedoman pelaksanaan tugas, Menghimpun dan menyusun data anggaran kegiatan untuk bahan penyusunan RKA/DPA Badan untuk disampaikan kepada Bupati dan dijadikan bahan penyusunan DPA Perangkat Daerah serta Menghimpun dan mengolah data anggaran kegiatan untuk bahan penyusunan Renstra Badan,
- o Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berupa Menghimpun data kegiatan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan, fisik kegiatan, dan LAKIP Badan,

o **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- o Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Berupa Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan selama 1 Tahun (12 Bulan),
- o Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN berupa terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan selama 1 tahun (12 bulan) , yang bertujuan untuk tersedianya dokumen-dokumen administrasi keuangan dan tertibnya pengelolaan keuangan yang baik berlokasi di BPPRD,

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD berupa laporan keuangan dan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 dokumen , yang bertujuan untuk laporan SKPD berlokasi di BPPRD,
- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
 - Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, berupa kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sebanyak 12 orang , yang bertujuan untuk peningkatan pemahaman dan kemampuan kinerja PNS.
- ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor, berupa Pengadaan perlengkapan Listrik Kantor selama 1 Tahun (12 Bulan), yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pelayanan kantor berlokasi di BPPRD,
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengadaan perlengkapan dan Perlengkapan kantor sebanyak 56 unit , yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pelayanan kantor berlokasi di BPPRD,
 - Penyediaan Peralatan rumah Tangga berupa Pengadaan Peralatan rumah Tangga selama 1 Tahun (12 Bulan), yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pelayanan kantor berlokasi di BPPRD,
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berupa Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor selama 1 Tahun (12 Bulan), berupa 20 Item Belanja, yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pelayanan kantor berlokasi di BPPRD,
 - Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu kegiatan pelayanan administrasi kantor yang berupa SPPD yang bertujuan untuk pengelolaan administrasi dan peningkatan kinerja perkantoran berlokasi di BPPRD
- ***Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik berupa kegiatan Pelayanan Pembayaran Listrik Jalan Umum Yang ada di kabupaten Lampung tengah serta pembayaran Listrik Kantor BPPRD.
- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas , berupa pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas operasional sebanyak 16 unit , yang bertujuan untuk terpeliharanya kendaraan dinas operasional berlokasi di BPPRD
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 129 unit , yang bertujuan untuk terpelihara/terawatnya peralatan kantor berlokasi di BPPRD

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun , yang bertujuan untuk terpeliharanya gedung kantor berlokasi di BPPRD

2. *Program Pengelolaan pendapatan Daerah*

• *Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Berupa Pelayanan dan Sosialisasi Yang dilakukan Kepada PPATs dan Protokol PPATs di Kabupaten Lampung Tengah Sebanyak 56 Orang Guna Penjelasan perhitungan BPHTB.
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Berupa tersedianya Data PBB-P2 Yang dimuktahirkan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendataan Daerah dari Sektor PBB-P2 yang berlokasi di 28 Kecamatan.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah berupa pelayanan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah (PBB) sebanyak 28 kecamatan , yang bertujuan untuk tersedianya dokumen pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah (PBB) berlokasi di 28 Kecamatan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Berupa Kegiatan Pengawasan dan Perbaikan Alat Perekam Transaksi usaha yang terletak di beberapa Objek Pajak yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan daerah yang berlokasi di Beberapa Objek Pajak di Lampung Tengah.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Berupa Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba), yang bertujuan untuk tersedianya dokumen Pendaftaran dan Pendataan yang berlokasi di BPPRD.
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah berupa kegiatan Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi sebanyak 11 jenis pajak , yang bertujuan untuk tersedianya publikasi,dokumen dan realisasi penerimaan
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa kegiatan penilaian, perhitungan dan penetapan PBB P2 sebanyak 28 kecamatan , yang bertujuan untuk tersedianya data perhitungan dan ketetapan pajak PBB P2 berlokasi di 28 Kecamatan
- Penetapan Wajib Pajak Daerah Berupa kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah , yang bertujuan untuk tersedianya data Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Asli Daerah yang berlokasi di BPPRD
- Penelitian dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah Berupa Update Data Wajib pajak yang bertujuan untuk terlaksananya Instensifikasi Pendapatan Asli Daerah berlokasi di 28 Kecamatan.

- Penagihan Pajak Daerah berupa Kegiatan Penagihan Tunggakan-tunggakan yang Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak serta kegiatan pendistribusian, pengolahan data dan keberatan PBB P2 sebanyak 28 kecamatan , yang bertujuan untuk terlaksananya pendistribusian SPPT PBB, tersedianya data omzet pajak dan penyelesaian keberatan PBB meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi berlokasi di 28 Kecamatan.
- Penyelesaian Pajak Daerah berupa Kegiatan bertujuan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah guna tercapainya Target PAD berlokasi di 28 Kecamatan
- Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah berupa Kegiatan Penagihan tunggakan pajak sebanyak 28 Kecamatan atau wajib pajak yang berada diluar Kabupaten Lampung Tengah yang bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Daerah yang Berlokasi di 28 Kecamatan atau Luar Kabupaten Lampung Tengah.
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Darah Berupa Data Potensi Pajak Daerah dan Dokumen Produk Hukum di bidang Pajak dan retribusi Daerah yang bertujuan untuk terlaksananya Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Guna Meningkatkan PAD berlokasi di 28 Kecamatan

c. Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja pada Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan 3 (tiga) Indikator kinerja (outcome). Untuk Tahun Anggaran 2021 pencapaian indikator kinerja outcome dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 107.10 % atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 3.238
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Urusan Keuangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2021				OPD Penanggung Jawab	KET
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	WTP	100%	BPKAD	
2	Persentase Ketercapaian Target PAD	Rp	93.961.730.200	100.473.319.667	107.16%	BPPRD	
3	Persentase Data Potensi Pajak yang memenuhi Kewajiban						
	a. Pajak Hotel	Rp	750.000.000	861.407.019	114.85%	BPPRD	
	b. Pajak Rumah Makan	Rp	3.000.000.000	3.591.430.475	119.71%	BPPRD	

c. Pajak Hiburan	Rp	350.000.000	272.111.284	77.75%	BPPRD	
d. Pajak Reklame	Rp	1.250.000.000	1.385.458.130	111.84%	BPPRD	
e. Pajak Penerangan Jalan	Rp	48.639.016.900	50.613.340.873	104.06%	BPPRD	
f. Pajak Air Tanah	Rp	7.700.512.454	8.829.856.091	115.96%	BPPRD	
g. Pajak Parkir	Rp	600.000.000	543.742.538	90.62%	BPPRD	
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	750.000.000	871.134.343	116.15%	BPPRD	
i. Pajak BPHTB	Rp	5.850.000.000	4.968.284.019	84.93%	BPPRD	
j. Pajak PBB-P2	Rp	25.072.200.846	28.425.626.060	113.38%	BPPRD	
k. PBB-P2 Tunggal	Rp.	200.000.000	257.940.719	128.97%	BPPRD	
Capaian Rata-Rata				107.16%		

Sumber data : BPPRD dan BPKAD

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan retribusi dan pajak daerah, serta pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya realisasi pajak daerah, retribusi daerah, realisasi PAD, realisasi dana perimbangan dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah, serta Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2021 realisasi pendapatan pajak daerah mencapai Rp. 100.691.283.459 atau 107.16 persen dari target yaitu Rp. 94.161.730.200 yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah daerah pada tahun 2020 realisasi tersebut mengalami Peningkatan sebesar Rp. 13.530.325.568 atau sebesar 16 %.

Tabel 3.239
Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 – 2021

No.	PAD	2020	2021
1.	Target Pajak Daerah	80.810.571.537	94.161.730.200
2.	Realisasi Pajak daerah	87.160.957.891	100.691.283.459
	Prosentase	128	106.98

Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pada tahun 2021 realisasi pendapatan retribusi daerah mencapai Rp 8.048.234.450 atau 69.64 persen dari target yaitu Rp. 11.557.000.000 yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 2.113.765.550 atau sebesar 20.96 persen dikarenakan Target Pada Tahun 2021 Mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi

Tabel 3.240
Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 – 2021

No.	PAD	2020	2021
1.	Target Retribusi Daerah	9.930.827.299	11.557.000.000
2.	Realisasi Retribusi daerah	10.162.000.000	8.048.234.450
	Prosentase	97.73 %	69.64%

Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp. 249.863.488.703 atau 118.65 persen dari target yaitu Rp. 210.592.445.386 yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 64.901.271.733,87 atau sebesar 35.5 persen.

Sebagai gambaran perkembangan realisasi PAD kabupaten Lampung Tengah sebagaimana table berikut.

Tabel 3.241
Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020-2021

No.	PAD	2020	2021
1.	Target PAD	188.457.965.518,48	210.592.445.386
2.	Realisasi PAD	184.731.584.540,13	249.632.856.274
	Prosentase	98.02 %	118.54 %

Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Selain hal-hal tersebut di atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang keuangan ditunjukkan pula oleh pemberian penghargaan selama tahun 2021, dari tingkat provinsi maupun nasional,

Tingkat Nasional

1. (Menjelaskan Jenis Penghargaan, Dari Siapa, dan Kapan perolehan penghargaan dimaksud)
2. dst

Tingkat Provinsi

1. (Menjelaskan Jenis Penghargaan, Dari Siapa, dan Kapan perolehan penghargaan dimaksud)

d. Permasalahan dan solusi**Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Keuangan serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah :

1. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dampak pandemi covid 19 mengakibatkan pendapatan menurun.
3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk pembayaran pajak.
4. Kurang optimalnya wajib pajak rumah makan, pajak hiburan dan parkir dalam menyampaikan laporan transaksi penerimaan pajak.
5. Masih banyaknya para Wajib Pajak Air Tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pemakaian Air (SIPA) tapi belum memasang Water Meter sehingga pajak yang disetorkan belum optimal.
6. Sanksi Hukum belum diterapkan sepenuhnya terhadap para Wajib Pajak.
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Bidang Perpajakan.

Solusi

1. Aplikasi Layanan Online 10 Pajak Daerah.
2. Integrasi / host to host secara online pajak BPHTB dengan BPN, dan Integrasi data dengan DPMPTSP serta pembayaran realtime ke Bank Lampung untuk 10 Pajak Daerah.
3. Alat Perekam Transaksi Pembayaran Pajak Restoran, Hiburan, Hotel dan Parkir (Tapping box) online. Yang sudah terpasang sebanyak 30 buah dan yang sudah diusulkan sebanyak 20 buah.
4. Alat Pencatat pemakaian air bawah tanah (QR.CODE) online yang sudah terpasang sebanyak 34 buah. dengan kamera pemantau sebanyak 10 buah.
5. Tanda tangan digital untuk administrasi perpajakan.
6. Pengembangan pemasangan QR-Code Pajak Air Tanah sebanyak 300 buah.
7. Sistem aplikasi Pembayaran Pajak Daerah "Berjaya Tax".
8. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak dan pembayaran E-STPD dan SSPD secara online.
9. OPD yang mengelola retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dapat melakukan Entri langsung terhadap laporan realisasi melalui web aplikasi Layanan secara online.

Gunung Sugih, Januari 2022

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002